

Judul : UMP Naik Dikit, Buruh Mogok, Senayan Berharap Ada Jalan Keluarnya
Tanggal : Rabu, 24 November 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

UMP Naik Dikit, Buruh Mogok Senayan Berharap Ada Jalan Keluarnya

ANGGOTA Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati berharap, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tidak sepihak mengambil keputusan penentuan UMP (Upah Minimum Provinsi). Kemnaker diminta mengedepankan dialog dengan melibatkan stakeholder terkait pembicaraan UMP.

“Sudah kita sampaikan, dalam pengambilan keputusan, harusnya melibatkan semua stakeholder supaya masing-masing bisa mewakili dan bisa menyampaikan aspirasinya,” ucap Kurniasih di Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, pemerintah, serikat buruh dan perusahaan harus bersama-sama mencari titik tengah agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Jika hal ini dibiarkan tanpa solusi, akan berdampak buruk pada pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

“Sementara di tengah pandemi ini, kebutuhan meningkat. Tentu berdampak pada ekonomi keluarga pekerja. 1,09 persen itu rasanya kayak main-main. Tidak mencapai 50 ribu bahkan. Saya harap ini ada jalan keluarnya,” terangnya.

Lebih lanjut, dia menilai perlu memaksimalkan kehadiran Dewan Pengupahan dalam mempertimbangkan UMP Tahun 2022.

Sebagai lembaga non-struktural yang bersifat tripartit, Dewan Pengupahan dapat berkontribusi memberikan saran, sekaligus pertimbangan terhadap kenaikan UMP Tahun 2022 yang proporsional.

“Kebijakan ini harus proporsional. Maka dari itu, saya pikir perlu duduk bareng. Sehingga, semuanya bisa menerima dengan baik dan semua bisa saling *take and give*,” tandas anggota Fraksi PKS itu.

Sebelumnya, Menteri

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengumumkan, rata-rata kenaikan nasional UMP Tahun 2022 sebesar 1,09 persen.

Kebijakan ini berdasarkan perhitungan formula pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Selanjutnya, penetapan UMP pada masing-masing provinsi berdasarkan pada penetapan gubernur.

Kurniasih bilang, tidak ada jaminan dengan upah murah pertumbuhan ekonomi dan investasi menjadi semakin baik. Sebaliknya, dengan tidak adanya kenaikan upah minimum, daya beli buruh akan runtuh.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menambahkan, kenaikan UMP semestinya harus melalui pertemuan tiga pihak. Artinya, ada pembicaraan yang melibatkan pemerintah, para pekerja dan pengusahanya. Dengan adanya trilateral itu, akan dicapai kesepakatan.

Kesepakatan tentu tidak memuaskan semua pihak. Berapa pun misalnya kenaikan itu, tentu para pekerja kita minta ditambah lagi. Begitu pun dengan para pengusaha pasti dianggap agak susah di tengah situasi ekonomi yang sulit sekarang ini.

“Jadi semua ini harus dijaga bagaimana caranya supaya kepentingan pekerjaanya dapat, kepentingan pengusahanya dapat,” ujar Saleh.

Kenaikan upah minimum versi pemerintah tersebut mendapat penolakan oleh jutaan buruh yang akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Desember.

Namun, sebelum aksi mogok kerja, puluhan ribu buruh berencana menggelar aksi unjuk rasa nasional di Istana Negara, Gedung Kemnaker, DPR dan Kantor Balai Kota DKI pada 29-30 November. ■ KAL